

Abstrak

Salah satu cara untuk mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang berkualitas dan wajar dengan memenuhi prinsip, kebijakan, serta etika pengadaan sebagaimana sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (KPKNL Bandung) merupakan unit vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Tujuan utama di bidang pengelolaan kekayaan negara adalah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, langkah yang dilakukan oleh KPKNL Bandung adalah dengan melaksanakan pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan serta sumber tertulis lainnya. Kemudian metode selanjutnya dilakukan dengan cara observasi serta wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam pengadaan jasa konstruksi renovasi rumah negara pada KPKNL Bandung. Kesesuaian antara setiap proses tahapan pengadaan dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dan peraturan lainnya mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah serta permasalahan dan kendala menjadi fokus penulis dalam penelitian ini.

Kata kunci: KPKNL Bandung, Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Rumah Negara, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Abstract

One way to realize the concept of good governance is through the procurement of government goods and services. Government procurement of goods and services aims to improve the quality of public services in order to create welfare for the society. Procurement of government goods and services is carried out to produce quality and reasonable goods and services by fulfilling the principles, policies, and procurement ethics as stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 concerning government procurement of goods/services. The Bandung State Wealth and Auction Service Office (KPKNL Bandung) is a vertical unit of the Directorate General of State Assets Management in charge of carrying out services in the fields of state wealth management, valuation, and auctions. The main goal in the field of state wealth management is to best serve the society. To improve the quality and the best service for the society, the step taken by KPKNL Bandung is to carry out the procurement of construction services for renovating state houses. The data collection method used is a literature study method, which is collecting data from laws and regulations and other written sources. Then the next method is carried out by means of observation and interviews with parties directly related to the procurement of construction services for state house renovation at the KPKNL Bandung. The conformity between each procurement stage process compared to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 2021 and other regulations regarding the procurement of government goods/services as well as problems and constraints are the focus of the authors in this study.

Keywords: KPKNL Bandung, Procurement of Construction Services for Renovating State House, Procurement of Government Goods and Services.